

CRIMINAL RESPONSIBILITY PADA ANAK: PENDEKATAN HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, DAN PSIKOLOGI

Fathul Lubabin Nuqul

Fakultas Psikologi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: lubab_psi@yahoo.com

Abstrak

Akhir-akhir ini telah terjadi peningkatan angka anak yang terlibat dalam kejahatan sebagai pelaku. Sebagai konsekwensinya anak pelaku kejahatan harus berurusan dengan aparat hukum guna tegaknya aturan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menegakan keadilan baik untuk pelaku maupun untuk korban, serta masyarakat luas. Permasalahannya adalah bagaimana jika pelaku adalah masih berusia anak-anak. Hal ini tentu bukan perkara mudah untuk menanganinya, karena anak merupakan individu yang rentan akan problem mental. Sehingga muncul keraguan untuk memidanaan anak yang melakukan kejahatan. Dalam pendekatan hukum positif salah satu tujuan sering kali justru meluka mental. Namun dalam Pendekatan hukum positif pada anak-anak. Sehingga muncul keinginan beberapa pihak untuk mengembalikan yang menjadi pelaku kejahatan an kepada orang tua, namun hal ini dianggap kurang mewakili rasa keadilan bagi pihak korban. Untuk menteaah lebih lanjut maka perlu analisa yang mendalam baik dari sisi ilmu hukum baik hukum positif maupun psikologis untuk mentelaah sejauh mana hukuman atau perlakuan yang layak untuk pelaku kejahatan yang masih berusia anak-anak. Di sisi lain negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hal ini tidak bisa dikesampingkan, karena ajaran atau nilai yang dipegang oleh komunitas merupakan kunci dari dinamika penilaian keadilan yang dipegang oleh masyarakat. Hal ini telah diamini oleh pandangan hukum progresif. Untuk itu tulisan ini berupaya untuk mencari kesinambungan antara konsep-konsep *criminal responsibility* pada anak dengan multi pendekatan yaitu pendekatan Hukum Positif, Hukum Islam dan Psikologis. Diharapkan manfaat dari kajian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif pada penegakan hukum dengan pelaku anak dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pada penegakan hukum khususnya komunitas Muslim.

Key Word: Criminal Responsibility, Child, Islamic Law, Psychology and Law.

A. Pendahuluan.

Anak adalah aset, anak adalah titipan Allah pada orang tuanya. Seorang anak idealnya hidup dalam keceriaan, dunia anak adalah dunia bermain, proses belajar selakukan dengan bermain dan suasana yang menggembirakan. Di sisi lain sebagian anak diusianya yang seharusnya bermain dan selalu ceria tersebut anak harus berhadapan dengan hukum.

Dari data, tercatat sebanyak 921 anak di Provinsi Bengkulu harus berurusan dengan hukum karena ter-sangkut sejumlah kasus kriminal. (www.harianhaluan.com, 23 Januari 2011). Dalam satu tahun ada 4000 lebih perkara hukum yang dilakukan pada anak-anak. Untuk wilayah Cirebon yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Majalengka dan Indramayu, selama tahun 2010 tercatat ada 167 kasus yang pelakunya

adalah anak di bawah umur. Angka statistik mengenai kenakalan anak ini tidak menggambarkan sebenarnya, karena seringnya orang tua campur tangan sehingga tidak masuk dalam catatan polisi. Belum ada rilis data dari pihak-pihak yang resmi yang mencatat angka anak pelaku kejahatan. Jika fenomena ini dianggap fenomena gunung es, maka sebenarnya jumlah anak pelaku kejahatan cukup banyak. Hal ini perlu pertimbangan khusus dalam penanganannya.

Permasalahannya adalah apakah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dianggap tindak kejahatan dan bagaimana memperlakukan anak-anak pelaku kejahatan ini. Apakah mereka juga harus mendapatkan hukuman seperti orang dewasa?

Pada tulisan ini akan dibahas tentang kajian pertanggung jawaban pidana pada anak. Pembahasan tentang pertanggung jawaban pidana ini dirasa cukup menarik dan memberikan kemanfaatan pada peilaian hukum. Kajian ini menggunakan pendekatan multidisipliner, antara hukum positif, hukum Islam dan psikologi. Kritikan bahwa pelaksanaan hukum dan kajian hukum yang cenderung normatif serta eksklusif. Tampaknya perlu ada pertimbangan pendekatan lain, dan hukum diharapkan mampu membuka ruang kajiannya di masyarakat umum guna mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu membentuk perilaku hukum dan memberikan Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam arah pembuatan produk hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Norma hukum Islam juga perlu mempertimbangkan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, karena secara ilmu hukum landasan moral dan norma yang berlaku di masyarakat berperan pada diri individu dan masyarakat secara umum dalam mentaati hukum atau respon pada produk hukum yang ada.

B. Sekilas Hukum Pidana Islam dan Pertanggungjawaban Pidana Anak

Dalam ajaran Islam terdapat hukum fiqh jinayat, yang mengatur tentang tindak pidana. Landasan dari fiqh jinayat ini berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist. Ada tiga jenis delik dalam hukum jinayat, yaitu; *hudud*, *qishos-diat* dan *takzir*. *Qishos* adalah hukuman bagi pelaku kejahatan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan pada korban, misalnya membunuh dihukum dengan dibunuh. *Diat* adalah hukuman denda atau harta yang harus dibayar atas kerugian yang dia timbulkan atau nyawa yang dia hilangkan. *Takzir* merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku kejahatan yang batasannya tidak disebutkan dalam Islam, sedangkan *Hudud* adalah hukuman yang harus dilaksanakan yang erat hubungannya dengan Allah SWT. (Munajat, 2009; Ghassemi, 2009).

Penetapan hukum Islam sebagai prosedur landasan pembedaan masih kontroversi bahwa dalam kelompok muslim sendiri. Terjadi perpecahan pendapat tentang penerapan hukum Islam, paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu kelompok liberal yang menentang penerapan hukum Islam dan kelompok konservatif yang mendukung. Kelompok konservatif atau Kelompok literalis dalam masyarakat Muslim, mengatakan tidak ada kompromi dalam melaksanakan *nash syar'iat* yang tegas. Sementara kelompok muslim moderat atau liberal melihat hukuman *hudud* paling tinggi sebagai bentuk ancaman hukuman maksimal (*ultimum remedium*), yang tidak selalu harus dijalankan di dalam praktik (Mahendra, 2007).

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan hadist:

sgam-
nasuk
angka
arnya
dalam

ak di-
an ini.

anak.
nberi-
tidisi-
n hu-
u ada
unnya
ilaku
ipkan
ngan
asya-
noral
ecara

lana.
delik
bagi
lunya
larus
upa-
nya
akan

versi
ipan
tang
iser-
omi
atau
imal
007).
tutuk
atau
akal

Dari 'Aisyah Radhiyallaahu 'anhua bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Pena diangkat dari tiga orang (malaikat tidak mencatat apa-apa dari tiga orang), yaitu: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal normal atau sembuh." Kiwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi. Hadits shahih menurut Hakim. Ibnu Hibban juga mengeluarkan hadits ini.

Seorang anak tidak dikenai pidana atas kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia dewasa. Seorang hakim (*qadhi*) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantunya memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang (Doi, 1992).

Menarik sekali mengkaji tentang "dewasa" dalam hadist ini terkait dengan aspek psikologi dan penuntutan pidana. Dalam kajian Fiqh ada ada istilah *mumayyiz* dan *Aqil baligh*. *Mumayyiz* dapat diartikan Sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang benar. Biasanya ditujukan kepada anak-anak berumur 3-10 tahun. Pada peringkat ini mereka hanya dapat membedakan yang mana baik dan yang mana buruk, apabila mereka mendingar, melihat dan merasa. Contohnya : Jika seorang bapa memberitahunya bahwa mencuri itu tidak baik lalu pikirannya akan menetapkan bahwa mencuri itu tidak baik.

Secara psikologis, pada masa kanak-kanak, awal belajar dari merasa, apabila diletakkan dua benda dihadapannya api dan air, kemungkinan dia akan menyentuh kedua-duanya. Akan tetapi apabila dia terasa panas, tangannya akan menarik balik. Bila ia merasa keseduan yang tidak memudaratkan kemungkinan dia akan bermain-main dengan air itu. Jadi *Mumayyiz* merujuk pada konsep kognitif. Hal ini seiring dengan konsep *criminal responsibility*, dengan mengedepankan aspek perkembangan pelaku. Aspek perkembangan mempengaruhi kemampuan individu dalam mengekspresikan emosi maupun pengambilan keputusan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Peaget (dalam Harlock, 1980) bahwa kapasitas untuk pengambilan keputusan pada remaja, karena keterbatasan pengalaman serta dalam pengendalian emosi.

Adapun pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu Arief (1987). Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.

C. Criminal Responsibility Anak dalam Hukum Positif

Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menentukan beberapa bentuk perilaku salah atau ilegal. Meskipun demikian perilaku antisosial tidak selamanya mendapat dapat stigma jelek jika dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, hukum cenderung menggunakan kalimat, "criminal responsibility". *Criminal Responsibility* didefinisikan sebagai proses yang terkait dengan tersangka pelaku kejahatan, kisaran usia menentukan bebasnya seorang anak dari sistem penuntutan dan hukuman orang dewasa.

Criminal responsibility pada Hukum Pidana Indonesia, khusus untuk pengecualian untuk pelaku kejahatan anak-anak diatur dalam pasal 45 KUHP. Selain itu ada beberapa dasar hukum yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum terkait tindakan sebagai

pelaku, pertama KUHPP pasal 45, UU no 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, dan UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Selanjutnya sejak diundangkannya UU tentang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 maka hukuman untuk pelaku pelanggaran seksual menjadi lebih berat, sesuai dengan pasal 82 UU no 23 tahun 2002, pelaku pencabulan diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 300.000.000,-.

Siapakah anak? Dalam hukum Pidana Indonesia definisi anak dibatasi secara berbeda-beda. Menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Anak didefinisikan dalam undang-undang RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak " anak adalah seseorang yaang belum berusia 18 tahun" (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Sosial Republik Indonesia, 2003).

Berbeda dengan Pasal 45 KUHPP yang menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan berkaitan dengan anak menjadi korban pidana, KUHPP mengatur umur anak belum genap 15 (lima belas) tahun (Soesilo, 1996). Dalam hal hukuman pidana pada hukum pidana positif, ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang penjatuhannya pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhannya pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi agar anak dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Perbedaan ini dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana.

Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

D. Criminal Responsibility (Pertanggungjawaban Pidana); Kajian Psikologi Hukum

Pertanggungjawaban pidana terkait dengan kemampuan orang dalam mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Ada empat elemen yang dibutuhkan untuk menentukan apakah orang tersebut dianggap, secara hukum, harus bertanggung jawab atas tindakannya. 1). *Actus reus*, yaitu adanya terdakwa yang terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum atau ilegal; 2).Terdakwa melakukan tindakan dengan sebuah niatan atau tujuan. Hal ini dikenal dengan istilah *mind state* atau *mens rea* dari terdakwa, hingga mereka berniat untuk menyempurnakan akibat-akibat atau hasil dari tindakannya; 3). Tindakan-tindakan terdakwa harus telah menyebabkan konsekuensi atau hasil tertentu yang dilarang; 4). Terdakwa tidak dalam kondisi yang secara hukum dibenarkan untuk melakukan tindak pe-

langgaran karena sebab tertentu seperti gangguan jiwa, atau pembelaan diri (Carson & Felthous, 2003).

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Van Hamel (Tongat, 2009) kemampuan pertanggungjawaban merupakan keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang mempunyai tiga macam kemampuan: 1). Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang dia lakukan; 2). Mampu menyadari bahwa tindakannya dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, dan; 3). Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan. Selanjutnya menurut Katane-gara seseorang dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakannya harus memenuhi 3 syarat: 1). keadaan jiwa yang kurang tersebut adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatan itu, sehingga dapat juga mengerti akibat dari perbuatannya; 2). Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupan sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya; 3). Orang itu harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang atau yang tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.

Dari syarat tersebut maka tidak dapat diharapkan seorang anak yang masih kecil bisa menilai perilakunya, dan akibat dari perilakunya karena keadaan jiwanya masih belum sempurna. Anak-anak di bawah usia tertentu terlalu muda untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Konsep tersebut yang tertuang dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak PBB, yang menyerukan negara-negara untuk membuat sebuah usia minimum "anak-anak harus dianggap tidak memiliki kapasitas untuk melanggar hukum pidana."

Sistem peradilan khusus anak yang terpisah dengan sistem peradilan pidana dewasa. Di sini, pengadilan berbasis kesejahteraan dan menangani anak-anak yang membutuhkan tindakan penanganan dan perawatan. Anak-anak dialihkan ke dalam sistem pengadilan anak ketika mereka telah melakukan tindak pidana pada orang dewasa. Dasarnya adalah keterbatasan fisik dan psikis anak dalam melakukan kejahatan membuat anak-anak dianggap tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan tertentu seperti tindakan kejahatan seksual atau lainnya yang membutuhkan kemampuan kualitas yang lebih matang.

Dengan demikian, masing-masing negara sedang mempertimbangkan bentuk tindakan yang akan diberikan pada anak jika anak tersebut melakukan kejahatan. Di beberapa negara, membuat hubungan antara anak-anak sebagai terdakwa dan Terdakwa yang dikurangi tanggung jawab atas dasar suatu penyakit mental.

Dalam hukum pidana, di setiap negara akan mempertimbangkan sifat masyarakat sendiri dan bukti yang tersedia dari usia di mana perilaku antisosial mulai muncul. Beberapa masyarakat akan memiliki pengecualian terhadap kaum muda dan kekurangan pengalaman, dan mereka tidak akan dikenai sistem hukum pidana. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki kebijakan *Doli incapax* (ketidakmampuan melakukan kejahatan) dan mengecualikan kewajiban untuk semua tindakan dan kelalaian yang seharusnya sudah masuk kriminal sampai usia tertentu. Oleh karena itu, tidak peduli apa anak mungkin telah melakukan, hal ini tidak bisa menjadi penuntutan pidana.

Meskipun tidak ada pertanggungjawaban pidana seperti yang dijelaskan di atas, aspek aspek lain dalam hukum dapat diterapkan. Sebagai contoh, di negara-negara Eropa utara, tindak pidana oleh orang di bawah 15 tahun sebagian besar dianggap merupakan gejala dari masalah perkembangan anak. Hal ini akan menyebabkan otoritas sosial untuk meng-

ambil langkah-langkah administratif yang layak untuk menjamin perkembangan anak. Upaya tersebut dapat berupa konseling untuk penempatan pada unit perawatan khusus. Tindakan tersebut tidak tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan tetapi tergantung pada keseluruhan keadaan anak.

Kebijakan memperlakukan anak di bawah umur sebagai pihak yang tidak mampu melakukan kejahatan tidak selalu mencerminkan kepekaan modern. Jadi, jika rasionalisasi dari alasan ini bahwa anak-anak di bawah usia tertentu kurang dalam kapasitas untuk membentuk *mens rea* (niat) suatu tindak pidana, ini mungkin tidak lagi menjadi argument yang kuat. Memang, mengingat kecepatan perkembangan fisik dan psikis yang berbeda, segala bentuk pembatasan usia secara eksplisit mungkin sewenang-wenang dan irasional. Namun, perasaan bahwa anak-anak tidak layak terkena hukuman pidana seperti layaknya hukuman orang dewasa tetap kuat. Anak-anak tidak memiliki pengalaman hidup, juga tidak memiliki kapasitas mental dan intelektual yang sama seperti orang dewasa. Oleh karena itu, mungkin dianggap tidak adil untuk memperlakukan anak-anak dalam cara yang sama seperti orang dewasa.

Psikologi dan hukum berseberangan mengenai landasan pemikiran tanggung jawab pelaku kejahatan (*criminal responsibility*). Hukum pada umumnya menilai bahwa individu mempunyai kemampuan utuh untuk mengendalikan dan mempengaruhi masa depan mereka, karenanya individu tersebut mempunyai kebebasan itu untuk memilih pilihan yang akan dipilih diantara opsi hidupnya. Sebaliknya, kebanyakan psikolog akan membantah bahwa perilaku ditentukan oleh hukum alam. Mereka mengatakan bahwa sungguh mempunyai kapasitas untuk merencanakan berbagai perilaku dan menentukan pilihan, Pilihan-pilihan tersebut itu dan cara mengekspresikan diri individu dipengaruhi oleh baik aspek biologi dan interaksi individu dengan lingkungan. Tampak terdapat asumsi-asumsi yang berbeda tentang perilaku manusia yang menimbulkan perdebatan dan polarisasi antara hukum yang mengatakan bahwa manusia itu bebas bertindak dan polarisasi yang mengatakan bahwa perilaku manusia terkait aspek *determinism*. Meskipun demikian asumsi dari dunia hukum tentang *free will* digunakan untuk menentukan tanggung jawab pelaku kejahatan (*criminal responsibility*) (Dennison, 2007).

Lebih lanjut Dennison (2007) menjelaskan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh kepercayaan moral tentang tanggung jawab yang bertentangan dengan pendekatan utilitarian yang merupakan karakteristik dari psikologi. Bagaimanapun juga, dasar dari tujuan penekanan moral di dalam hukum dan pendekatan yang utilitarian di dalam psikologi adalah sama. Usulan akan dibuat untuk meninjau ulang prinsip-prinsip dari tanggung jawab pelaku kejahatan yang sesuai dengan fungsi keselamatan masyarakat. Pendekatan tersebut meliputi memahami tentang perilaku sukarela, kendali dan niatan, dengan cara yang tetap memperhatikan tujuan-tujuan dan tanggung jawab dari sistem hukum.

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan komponen vital dalam seluruh sistem keadilan dan kontrol sosial. Anggota dari suatu kelompok atau masyarakat diharapkan mengikuti aturan dan pelanggaran pada aturan tersebut akan dinilai dan kemungkinan mendapatkan hukuman dari orang lain (Pennington & Schlenker, 1999). Jika pelanggaran aturan terjadi, tanggung jawab memberikan mekanisme memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan. Penilaian pembedaan yang layak diberikan pada pelaku kejahatan juga melibatkan analisis tentang tanggung jawab seseorang (Feather, 1999)

nak.
sus.
tapi

ipu
sasi
tuk
ent
da,
ial.
iya
iga
leh
ura

ab
Ju
an
an
n-
ih
n,
ik
si
si
m
n
n
b

Penilaian *criminal responsibility*, seperti yang kemukakan oleh Carson dan Felthous (2003), akan dibebankan penuh pada pelaku kejahatan jika ada kekuatan penuh pada niat melakukan kejahatan, cara atau modus kejahatan dan hasil kejahatan yang nyata. Misalnya seseorang melakukan pembunuhan yang dianggap bertanggung jawab penuh pada tindakannya dia dalam melakukan pembunuhan telah direncanakan, orang tersebut menggunakan senjata yang mematikan, semisal senjata tajam atau senapan, dan korban benar-benar mati. Terkait dengan penilaian tentang kesengajaan dari seorang penjahat merupakan mediator utama dari sikap terhadap hukuman. Seseorang dianggap melakukan sesuatu kesalahan secara tidak sengaja, dianggap tidak harus bertanggung jawab dan dihukum lebih ringan daripada seseorang yang dianggap melakukan kesalahan secara sengaja. Hubungan ini ada, karena sebuah tindakan yang disengaja merupakan tindakan yang menunjukkan kemungkinan besar dilakukan oleh seorang penjahat. Tidak hanya itu, kesalahan yang dilakukan secara sengaja lebih menimbulkan hukuman dibanding dengan yang tidak disengaja. Hal ini disebabkan kesalahan tersebut mengindikasikan ketidak taatan pada aturan dan bahkan merupakan ancaman dari integritas aturan tersebut (Heider, 1958).

Potensi Masalah mungkin muncul dengan menggunakan suatu banyak sekali cara untuk memenuhi suatu persyaratan niat yaitu bahwa niat adalah suatu besar bagian dari penentuan tanggung jawab pelaku kejahatan dan tanggung jawab tersebut mengakibatkan hukuman. Oleh karena itu, dimungkinkan bahwa perorangan bisa dihukum karena mereka berniat untuk melakukan kejahatan, meskipun mereka tidak benar-benar merealisasikan (Carson & Felthous, 2003). Sebagai contoh, orang yang telah bertindak secara sembrono dan tanpa memperhatikan akibatnya. Kemauan dan kemampuan hukum itu untuk membuat kesimpulan-kesimpulan tentang kondisi mental dari niat dan kemampuan melihat masa lalu menjadi pertanyaan dasar atas kebenaran dan ketepatan bangunan hukum (Malle & Nelson, 2003). Di sisi lain pendapat umum (*common sense*) tentang niat menentukan atau mempunyai dukungan lebih baik dalam pengambilan keputusan juri (atau hakim dalam budaya hukum Indonesia) dan persepsi-persepsi keadilan masyarakat (Malle & Nelson, 2003).

Sebuah penelitian tentang definisi "tindakan yang disengaja" dengan mengambil sampel mahasiswa *undergraduate*. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa ada 4 komponen dari kesengajaan, yaitu; 1). Keinginan untuk mencapai hasil; 2). Ada kepercayaan bahwa tindakan yang dilakukan akan memberikan sebuah hasil; 3). Adanya sesengajaan untuk melakukan tindakan tersebut; 4). Kesadaran pemenuhan niat dengan melakukan tindakan tersebut (Malle & Nelson, 2003). Kemudian Dennison (2007) menambahi komponen Skill yang mengacu pada penjelasan dari penelitian yang dilakukan oleh Malle dan Knobe (dalam Malle & Nelson, 2003). Model yang dimukakan oleh Malle dan Knobe (dalam Malle & Nelson, 2003) menimbulkan pertanyaan tentang definisi hukum dari niat dan hal itu juga menimbulkan kesalahan untuk pelaku. Malle & Nelson (2003) menjelaskan bahwa niatan dan kesengajaan sering kali diperlakukan sama dalam proses hukum sedangkan konsepnya berbeda. Seseorang mungkin berniat untuk melakukan tindakan tertentu tetapi faktanya tindakannya bisa berbeda dan mungkin di sisi lain tanpa sengaja seseorang melakukan tindakan tetapi hasilnya nyata ada. Dari hal tersebut mana yang harus dianggap belih bertanggung jawab dan hukum hendaknya memberlakukan hal ini berbeda. Malle & Nelson, (2003) menyatakan bahwa seseorang yang membentuk sebuah niat untuk melaksanakan tindakan pelanggaran atau illegal tertentu, tetapi tanpa sengaja melaksana-

kan suatu tindakan pelanggaran yang lain, hal ini mengakibatkan dua tuntutan yang terpisah dengan menambahkan hukuman yang berlapis. Malle & Nelson (2003) mengatakan bahwa intuisi-intuisi *common sense* tentang perilaku manusia juga akan ditegaskan untuk mendapatkan hukuman yang tepat untuk pelaku kejahatan.

Berbeda dengan Undang-undang pidana yang secara jelas dalam pasal 18 menegaskan: Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja (Moeljatno, 1993). Dari tersebut ada dua unsur dari kesengajaan yaitu adanya pengetahuan tentang hasil dan adanya keinginan untuk mencapai hasil tertentu.

Tanggung jawab ditetapkan pada seseorang dalam sebuah situasi yang a). jelas, menegaskan seperangkat aturan dapat diterapkan untuk peristiwa tersebut (ada hubungan antara peristiwa dengan aturan), b). orang tersebut dirasa terkait oleh aturan karena kapasitas identitas dia (hubungan antara identitas dengan aturan); c). pelaku berhubungan dengan peristiwa. Khususnya terlihat orang mempunyai kontrol terhadap peristiwa. Seperti kesengajaan dalam menimbulkan konsekuensi dari peristiwa (hubungan antara identitas dengan peristiwa) (Feather N. , 1999).

Kemampuan kontrol terhadap peristiwa atau tidak kejahatan merupakan aspek penting dalam penilaian *Criminal responsibility*. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia hanya terdapat dalam pasal 44 yang menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit" (Moeljatno, 1993: 1996; Soesilo, 1996). Dilepaskannya tanggung jawab untuk pelaku kejahatan mengalami penyakit jiwa disebabkan karena a). tidak ada kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang benar, membedakan perbuatan yang melanggar hukum dan yang tidak; b). tidak adanya kesadaran untuk melakukan tindakan yang berasal dari diri sendiri. Hal ini sejalan dengan yang telah dikemukakan diatas bahwa tanggung jawab melingkupi tentang niat atau kesengajaan, pengetahuan tentang hasil perbuatan dan pengetahuan tentang hasil perbuatan. Pemahaman yang seperti ini yang tidak dipunyai oleh orang yang mengalami sakit jiwa. Jika mengacu pada aspek-aspek yang seperti ini maka lepas tanggung jawab juga harus dikenakan untuk perbuatan atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur seperti yang telah diatur dalam pasal 45, pasal 46 dan pasal 46 KUHP tentang tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur akan memperoleh pembebasan pidana atau pengurangan pembedaan (Lih Moeljatno, 1996; Soesilo, 1996).

Tanggung jawab, menurut Weiner (1996) adalah sebab dan tanggung jawab juga merupakan akibat. Penilaian tanggung jawab memerlukan sumber keterlibatan manusia atau sebab akibat personal, seperti juga sebuah permintaan seseorang untuk mengontrol orang lain. Maka penentuan tanggung jawab untuk sebuah peristiwa memerlukan adanya atribusi eksternal, atau kapasitas melakukan kontrol pada tindakan atau peristiwa.

Penilaian tentang tanggung jawab pelaku kejahatan juga bisa dilakukan dengan menggunakan konsep *causal attribution*. Dalam konsep ini Harold Kelly (dalam Taylor, Peplau, & O'Sear, 2009) mengemukakan bahwa untuk meyakinkan bahwa penyebab tindakan seseorang bisa terlihat dari derajat 1). Konsensus: derajat kesamaan reaksi terdakwa terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang lain. 2) Konsistensi: derajat kesamaan reaksi terdakwa terhadap suatu stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda; 3). Distingsi: derajat perbedaan reaksi terdakwa terhadap berbagai stimulus dan

peristiwa yang berbeda-beda (Taylor, Peplau, & O'Sear, 2009). Jika konsensus dan konsistensinya rendah dan distingsinya tinggi maka tindakannya didasari dari faktor internal. Sebaliknya jika konsensus dan konsistensinya tinggi dan distingsinya rendah maka tindakan tersebut karena pengaruh faktor eksternal. Misalnya dalam kasus BWS (*Battered women syndrome*), pada kasus seperti ini seorang perempuan yang melakukan pembunuhan tidak dianggap bersalah karena dianggap melakukan *self defence* (Russell & Melillo, 2006). Untuk membuktikan hal ini maka perlu ada telaah apakah ada tekanan dari luar dan apakah tekanan tersebut membuat diangg wajar bagi perempuan tersebut untuk melakukan pembunuhan. Kawajaran tersebut bisa diukur dengan konsensus, sejauh mana orang lain akan melakukan hal yang saya (membunuh) jika menghadapi stimulus yang sama. Jika orang lain diprediksikan akan melakukan hal yang sama jika pada stimulus yang sama maka perempuan tersebut sangat mungkin mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan pembebasan hukuman.

Penilaian tanggung jawab pelaku kejahatan juga merupakan sebuah variabel yang berhubungan dengan sesuatu yang disebabkan olehnya, kesengajaan dan harapan peran (*role expectation*) yang disandang oleh seseorang (Feather, 1996; 1998). Harapan peran membawa implikasi terhadap tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang dan tanggung jawab sesuai peran yang dimaksud. Seseorang merasa bertanggung jawab terhadap sebuah peristiwa ketika dia dikontrol dan diharapkan untuk memunculkan perilaku atau tidak, jika peran seseorang menuntut terhadap perilaku tertentu. Bahkan jika seseorang melanggar perannya maka hukuman beratpun akan didapatnya misalnya seorang ayah harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anaknya. Maka jika ada seorang ayah memperkosa putrinya maka hukumannya akan lebih berat bila dibanding dengan orang asing yang melakukan pemerkosaan tersebut. Konsep tanggung jawab telah dibahas baik dalam psikologi maupun dalam bidang hukum. Maka dari itu Kesimpulannya tanggung jawab adalah perekat yang menghubungkan antara seseorang dengan konteks serta dengan tuntutan yang menentukan tugas yang harus dilakukan, kemudian tanggung jawab memberikan dasar penilaian dan persetujuan.

Penilaian tanggung jawab juga menjadi variabel mediator yang penting dalam sebuah model *information-processing of retributive justice* yang dikemukakan oleh Shultz and Darley (1991). Model ini membedakan antara tanggung jawab dengan kesalahan. Menurut pence-
tus model tersebut "penilaian terhadap tanggung jawab mengisyaratkan keputusan positif diidahuui dengan adanya hal yang menyebabkan" (h. 254). Sedangkan penilaian kesalahan (*blame*) menunjukkan penilaian yang diidahuui adanya tanggung jawab. (h. 255). Penilaian hukuman menunjukkan penilaian yang diidahuui oleh adanya kesalahan (h. 256). Seseorang dapat memegang tanggung jawab untuk peristiwa negatif tetapi berhasil menghindari kesalahan jika dia dapat memberikan alasan dan justifikasi yang tepat. Penelitian yang dilakukan oleh Shultz et al. (1981) dan Shultz and Rose (dalam Shultz & Darley, 1991) memberikan bukti adanya variabel mediasi di antara tanggung jawab dan kesalahan. Tetapi bagi Shultz et al. (1981). "Pertanyaan tentang tanggung jawab moral menimbulkan pertimbangan nilai dan menjadi sangat mirip dengan makna kelayakan (*deservingness*) dalam konteks hasil yang negatif."

Akhirnya analisa Shaver tentang atribusi kesalahan memberikan pada kita urutan model yang menggabungkan pemikiran-pemikiran dari psikologi sosial, ilmu hukum dan filosofi moral. Penilaian tanggung jawab (*responsibility*) berbeda dengan kesalahan (*Blame*)

dalam artian bahwa seseorang mungkin secara moral memegang tanggung jawab pada sebuah hasil tindakan, tetapi terbebas dari kesalahan karena dia dapat memberikan sebuah alasan dan pertimbangan. Misalnya polisi yang melakukan penembakan dalam upaya penangkapan penjahat, menurut KUHP pada 50 dan 51 (Moeljatno, 1996), polisi yang demikian tidak dianggap bersalah atau tidak dikenakan pidana karena melakukan tugas sesuai undang-undang dan perintah atasan. Polisi tersebut memang mempertanggungjawabkan tindakannya dengan melaporkan tindakan yang dilakukannya tetapi tidak dianggap bersalah.

Di sisi lain, Weiner (1995) menganggap bahwa kesalahan (*blame*) adalah konsep kombinasi yang sama dengan tanggung jawab dalam aspek kognisi tetapi juga melibatkan perasaan negatif semisal marah. Weiner juga mencatat bahwa kesalahan diaplikasikan untuk hasil dan tindakan negatif, sedangkan tanggung jawab secara afektif netral dan dapat diaplikasikan baik pada hasil tindakan yang positif maupun yang negatif baik yang tidak penting maupun yang penting.

Analisa literatur tentang konsep tanggung jawab menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab tersebut merupakan konsep yang kompleks dan terdapat perbedaan-perbedaan arti. Ada dua poin utama yaitu a). penentuan tanggung jawab mengacu pada sebuah kerangka tentang seseorang atau pelaku yang menghasilkan sebuah hasil dan isu personal maupun faktor eksternal yang terkait, semisal norma dan aturan; dan b). Terdapat hubungan antara pelaku dan tindakan, seorang pelaku dianggap sebagai penghasil tindakannya sendiri. Maka dari itu, keduanya (tindakan dan pelakunya) merupakan satu kesatuan. Kekuatan kesatuan ini bervariasi tergantung dari konteks dan kekhasan informasi yang tersedia berkaitan dengan sebab akibat dari perilaku tersebut.

Penilaian *deservingness* atau *undeservingness* dibatasi dalam model Feather untuk situasi pada ruang lingkup sebab-akibat pribadi (Internal) bukan pada aspek eksternal sebab-akibat adanya hasil tindakan. Ini berarti bahwa seseorang dianggap secara total bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan dan akibat yang mengikuti dari tindakan. Orang tidak dianggap layak mendapatkan akibat tindakannya jika mereka tidak dianggap bertanggung jawab bertanggung jawab, karena hasil tersebut akan dikaitkan dengan faktor eksternal di luar kendali orang tersebut. Namun, karena *deservingness* dirasakan sangat bergantung pada evaluasi hubungan antara tindakan dan hasil yang menghasilkan nya, *deservingness* dan tanggung jawab dirasakan tidak selalu berjalan secara paralel. Seseorang dapat bertanggung jawab untuk hasil yang dianggap layak, tetapi juga bertanggung jawab untuk hasil yang dianggap tidak patut (Feather, McKee, & Bekker, 2011).

Akhirnya Penilaian adil tidak sebuah pembedaan pada pelaku dinilai berhubungan dengan tindakannya yang mengakibatkan hasil yang negatif dan selanjutnya dapat dianggap bertanggung jawab yang disesuaikan antara peran pelaku dan konteks nilai serta norma yang berlaku.

E. Penutup; Implementasi dari kajian tentang pertanggungjawaban pidana dalam Psikologi Hukum Islam menuju perlakuan yang adil untuk.

Keadalam merupakan hal yang sangat abstrak, belum ada ukuran yang pasti tentang keadilan. meskipun demikian dalam kajian tentang keadilan masih banyak dilakukan dan masih menarik. Keadilan ada dua macam, yaitu keadilan subyektif dan keadilan

obyektif. Dalam pembahasan di psikologi keadilan dianggap sebagai keadilan subyektif, artinya ada beberapa variabel prediktor yang mempengaruhi penilaian keadilan. Dalam psikologi, rasa keadilan adalah penilaian.

Dalam konsep Islam sangat melindungi anak, agar anak terhindar dari perlakuan yang salah dari sebuah sistem. Maka pemahaman terhadap konsep Anak baik dari sisi potensi maupun sisi kerentanan harus dipunyai oleh aparat yang perwenang dalam hukum. Dalam beberapa hadist menunjukkan anjuran untuk memperlakukan anak-anak dengan baik.

"Cintailah anak-anak dan kasih sayangi lah mereka. Bila menijankan sesuatu kepada mereka tepatilah. Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki". (HR. Ath-Thahawi).

"Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu". (HR. Bukhari dan Muslim)

Hal ini tak terlepas jika anak-anak melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan. Jika untuk pelaku yang berusia dewasa, prinsip-prinsip retributif akan ditegakkan maka untuk pelaku anak konsepnya berubah menjadi konsep restoratif, dengan kengedepankan keberlangsungan dan kebaikan kehidupan anak sebagai pelaku dan korban yang dirugikan. Demikianlah, bahwa tulisan ini hanya gambaran awal tentang kajian psikologi dan hukum yang sedikit menyinggung tentang konsep Islam. Kedepan semoga kajian ini bisa diteruskan sampai menjadi kajian yang empiris.

Daftar Pustaka

- Arief, A. S. (1987) *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: Ideal.
- Carson, D., & Felthous, A. (2003). Introduction to this issue: Mens rea. *Behavioral Sciences and the Law*, 21, 559-62.
- Dennison, S. (2007). Criminal responsibility. In D. Carson, B. Milne, F. Pakes, K. Shalev, & S. A., *Applying Psychology to Criminal Justice* (pp. 131-165). West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- Doi, A. (1992) *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, terjemahan Sulaiman Rasjid, Jakarta: Rineka Cipta.
- Feather, N. (1999). Judgments of Deservingness: Studies in the Psychology of Justice and Achievement. *Personality and Social Psychology Review*, 3, 86-107.
- Feather, N. T. (1996). Reaction to Penalties for an Offense in Relation to Authoritarianism, Values, Perceived Responsibility, Perceived Seriousness and Deservingness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71 571-587.
- Feather, N. T. (1998). Reaction to Penalties for offenses Committed by Police and Public Citizen: Testing a Social-Cognitive Process Model of Retributive Justice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 75, 528-544.
- Feather, N. T., McKee, I. R., & Bekker, N. (2011). Deservingness and emotions: Testing a structural model that relates discrete emotions to the perceived deservingness of positive or negative outcomes. *Motivation and Emotion*, 35:1-13.
- Ghassemi, G. (2009). Criminal Punishment in Islamic Societies: Empirical Study of Attitudes to Criminal Sentencing in Iran. *Eur J Crim Policy Res*, 15:159-180.

- Hurlock, Elizabeth B. (1980). *Psikologis Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Erlangga.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. NewYork: Wiley.
- Mahendra, Y. I. (2007, Desember 5). *Hukum Islam dan Negara*. Retrieved Februari 2008, 2008, from <http://www.scribd.com/word/download/2262639?extension=pdf>
- Malle, B., & Nelson, S. (2003). Judging mens rea: The tension between folk concepts and legal concepts of intentionality. . *Behavioral Sciences & the Law* , 21, 563-80.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1996). *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Munajat, M. (2009). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jogjakarta: Teras.
- Russell, B. L., & Melillo, L. S. (2006). Attitudes Toward Battered Women Who Kill: Defendant Typicality and Judgments of Culpability. *Criminal Justice and Behavior* , 33, 219-241.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.
- Shultz, T. R., & Darley, J. M. (1991). An information processing model of retributive justice based on "legal reasoning." In W.M. Kurtines & J. L. Gewirtz (Eds.), *Handbook of moral behavior and development: Vol.2. Research* (pp. 247-278). Hillsdale,NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & O'Sear, D. O. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pres.
- Weiner, B. (1995). *Judgments of responsibility: A foundation for a theory of social conduct*. New York: Guilford.